UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Yuridis Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Republik Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
NABILA AMALIA, Oce Madril, S.H., M.A.
**Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdullah, Rozali. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV Rajawali.

Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Asmara, Galang. 2005. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*.. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djatmika, Sastra dan Drs. Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M., dkk, 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hartini, Sri, dkk. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Marbun, S.F. dan M. Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Masthuri, Budi. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Muchsan. 1982. *Hukum Kepegawaian, Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis)*. Jakarta: Bina Aksara.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Yuridis Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Republik Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
NABILA AMALIA, Oce Madril, S.H., M.A.
**Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Satoto, Sukamto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: HK Offset.

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*). Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sujata, Antonius dan RM Surachma. 2002. *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Tauda, Gunawan A. 2012. *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press.

Teguh, Ambar, dkk. 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.

Thoha, Miftah. 1986. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

Triatmodjo, Sudibyo. 1983. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Yuridis Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Republik Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
NABILA AMALIA, Oce Madril, S.H., M.A.
**Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Ombudsman

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Perjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia No. 1/ORI-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Keputusan Komisi Pengawas Persiangan Usaha No. 161/Kep/KPPU/XI/2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Rancangan Peraturan Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Yuridis Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Republik Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
NABILA AMALIA, Oce Madril, S.H., M.A.
**Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Jurnal, Penelitian, dan Makalah**

Kadarsih, Setiajeng. "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008". *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed Jawa Tengah*. Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Mochtar, Zainal Arifin. 2012. *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Zoelva, Hamdan. "Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia". *Jurnal Sekretariat Negara RI*. Nomor 18. 2010.

**Media Elektronik**

Dean M. Gottehrer Fundamental Elements of An Effective Ombudsman Institution diakses dari http://www.theioi.org/downloads/934ch/Stockholm%20Conference_15.%20Plenary%20Session%20II_Dear%20Gottehrer.pdf tanggal 28 Desember 2015

Gusman, Manajemen/Administrasi Kepegawaian, Balai Diklat Keagamaan Palembang http://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/ArtikelKaryaIlmiah/raqc1357702311.pdf tanggal 2 Januari 2015

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Lembaga Non Struktural* diakses dari http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-lembaga-non-struktural tanggal 20 Desember 2015

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L Dan Provinsi Meningkat* diakses dari http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat tanggal 21 Desember 2015

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Yuridis Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Republik Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
NABILA AMALIA, Oce Madril, S.H., M.A.
**Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Teten Masduki, Ombudsman dan Pemberdayaan, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F24278/Ombudsman%20dan%20Pemberdayaannya.htm diakses pada tanggal 29 Desember 2015

United States Ombudsman Association Public Sector Ombudsman diakses dari http://www.usombudsman.org/public-sector-ombudsman/ tanggal 14 Desember 2015